



Buletin Parlementaria

Nomor 1074/II/X/2019 • Oktober 2019



Pimpinan DPR Tinjau Kompleks Parlemen Jelang Pelantikan Presiden



9 772614 339005



6 Pimpinan DPR Fokus
Persiapan Pelantikan
Presiden dan Wapres



7 Penetapan Pimpinan AKD
Berlangsung Dinamis

Pimpinan DPR Tinjau Kompleks Parlemen Jelang Pelantikan Presiden

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang, Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel melakukan tinjauan *on the spot* di sejumlah titik di Kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Tinjauan diawali dengan mengunjungi Media Center DPR RI di Gedung Nusantara III, sekaligus berbincang dengan para wartawan.

Dengan mengendarai sendiri *boogie car*, Puan melanjutkan peninjauan dengan melihat kesiapan keamanan yang ada di pos Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) di gerbang depan

Gedung Parlemen. Selain berbincang mengenai kesiapan dan jumlah petugas kepolisian yang diterjunkan jelang agenda pelantikan Presiden, Pimpinan DPR RI juga memberikan *support* dan dukungan berupa buah-buahan kepada aparat kepolisian yang sedang bertugas.

Tinjauan Pimpinan DPR RI selanjutnya yaitu mendatangi tenda-



Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Pimpinan DPR RI melakukan tinjauan *on the spot* di sejumlah titik di Kompleks Parlemen. Foto: Kresno/HR



Ketua DPR RI Puan Maharani berdialog dengan Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) di Kompleks Parlemen. Foto: Kresno/HR

tenda prajurit TNI yang ikut bersiaga menjaga keamanan di Kompleks Parlemen. Sama halnya dengan yang dilakukan sebelumnya, selain berfoto bersama dan memberikan buah-buahan, Puan beserta Pimpinan DPR RI lainnya menyalami satu persatu prajurit TNI yang sedang bertugas tersebut.

Kegiatan dilanjutkan dengan menyambangi ruang KK II, yakni tempat digelar acara pengarahan yang diberikan oleh Wakapolda Metro Jaya kepada seluruh aparat kepolisian yang bertugas di wilayah Kompleks Parlemen, terkait penyempurnaan proses pengamanan yang akan dilakukan jelang agenda pelantikan Presiden dan Wapres masa jabatan 2019-2024.

Pada kesempatan itu, Puan mengatakan, sebagai Ketua DPR RI yang baru dilantik, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas keamanan, baik TNI maupun Polri yang telah bertugas dengan baik dalam menjaga stabilitas keamanan Gedung DPR RI, sehingga acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPR RI, termasuk

Anggota MPR RI dan DPD RI pada 1 Oktober yang lalu bisa berjalan dengan lancar.

“Masih banyak PR (pekerjaan rumah-red) yang memerlukan dukungan dari pihak Kepolisian dan TNI yang saat ini masih bertugas di Gedung DPR ini. Kita harus tetap semangat dan tetap menjaga supaya pelaksanaan pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober itu bisa berjalan secara kondusif,” pesan politisi PDI-Perjuangan itu kepada personel Kepolisian dan TNI.

Walaupun situasi dan kondisi di lapangan sangat berdinamika, Puan melihat soliditas dan sinergi Kepolisian dan TNI bisa tetap terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Semangat itu tentu saja harus kita kawal terus dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap semangat, tetap berjuang dan untuk NKRI harga mati kita lakukan termasuk menjaga kelancaran acara pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober yang akan datang,” tandasnya. ■ dep/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianie Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Purntho Pranowo, Singih Kinanti Rimban, Siti Nadiah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indanti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afduhillah, Geraldii Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan DISTRIBUSI (GRATIS)



Pimpinan DPR RI didampingi Sekjen DPR RI menggelar konferensi pers sebelum meninjau persiapan pengamanan dan fasilitas Kompleks Parlemen. Foto: Kresno/HR

Ketua DPR Bagikan Tupoksi Pimpinan DPR Periode 2019-2024



**KAMI BERUSAHA
MEMPERJUANGKAN
ASPIRASI MASYARAKAT
DENGAN LEBIH BAIK
MENGINGAT BANYAK
PEKERJAAN RUMAH
(PR) YANG HARUS
DILAKUKAN**

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sudah mengambil keputusan bersama Pimpinan DPR RI lainnya terkait dengan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tiap-tiap Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ia menambahkan, tupoksi pembedangan ini menjadi tanggung jawab seluruh Pimpinan DPR RI.

“Kami sudah dilantik beberapa waktu lalu. Saya sudah bagikan tupoksi pada setiap Pimpinan DPR RI lainnya yang ada,” kata Puan, dalam konferensi pers yang digelar sesaat sebelum meninjau sejumlah persiapan pengamanan dan fasilitas Kompleks Parlemen jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, di Gedung DPR RI,

Senayan, Jakarta, Selasa, (8/10).

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, pembagian tupoksi tiap-tiap Pimpinan DPR RI terdiri dari Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) yang dijabat Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (F-Golkar), kemudian Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) dijabat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra).

“Lalu, Rachmad Gobel (F-NasDem) menjadi Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) dan Muhaimin Iskandar (F-PKB) menjadi Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra),” jelas Puan.

Legislator dapil Jawa Tengah V itu

berharap, tupoksi yang sudah dibagikan kepada tiap-tiap Pimpinan DPR RI dapat dilaksanakan secara gotong royong. Puan juga menyampaikan, ke depannya ia bersama Pimpinan DPR RI lainnya akan berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik.

“Saya sudah membagikan tupoksi kepada Pimpinan DPR lainnya. Insya Allah apa yang kami lakukan secara gotong royong. Kami berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik mengingat banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan,” pungkas Puan. ■ pun/sf

Puan Maharani **Kecam** Penyerangan Menko Polhukam

Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam peristiwa penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang terjadi di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). Menurutnya penyerangan tersebut merupakan aksi kejahatan teror yang tidak berperikemanusiaan dan mengganggu alam demokrasi negeri.

“Peristiwa itu merupakan bentuk teror. Setiap aksi teror, yang ditujukan kepada siapapun adalah sebuah kejahatan. Kejadian yang menimpa Pak Wiranto menunjukkan bahwa ada kelompok yang mengedepankan aksi kekerasan di demokrasi sekarang ini,” ujar Puan dalam rilis yang diterima

Parlementaria, Jumat (11/10).

Puan menegaskan kembali aksi penyerangan terhadap Menko Polhukam menunjukkan ancaman teroris nyata adanya. Menurutnya dalam demokrasi berbeda pendapat dan tidak sepakat diperbolehkan, tetapi tindakan kekerasan fisik merupakan kejahatan yang harus mendapat ganjaran hukum yang berlaku.

“Kita sudah sepakat bahwa demokrasi adalah cara untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa. Protes boleh, tidak suka boleh, tapi kalau sudah membahayakan nyawa seseorang, nyawa siapa pun, itu adalah kejahatan,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.

Legislator dapil Jawa Tengah V itu meminta masyarakat tidak usah berspekulasi, dan mempercayakan

penanganan kasus ini pada aparat kepolisian. “Periksa pelakunya, dalam apakah ia lone wolf, bergerak sendiri, atau terkait jaringan teroris,” dorong Puan. ■ *eko/sf*

”

**SETIAP AKSI TEROR,
YANG DITUJUKAN
KEPADA SIAPAPUN
ADALAH SEBUAH
KEJAHATAN**

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Arief/HR



Pimpinan DPR Fokus Persiapan Pelantikan Presiden dan Wapres

Pimpinan DPR RI sedang fokus melakukan persiapan menjelang acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pasalnya, hari pelantikan sudah semakin dekat waktunya yang akan dilaksanakan di Gedung Parlemen pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam *press conference* yang digelar sebelum mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau sejumlah pengamanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.



PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAPRES AKAN DIRAPATKAN SECARA LEBIH DETAIL LAGI DENGAN PEMERINTAH, DALAM HAL INI SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG) UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN SESUAI ARAHAN KETUA DPR RI PUAN MAHARANI

“Pembahasan mengenai pelantikan Presiden sudah dibahas oleh segenap Pimpinan DPR RI. Kemarin, kami selaku Pimpinan juga sudah membicarakan dengan Sekjen DPR RI dan MPR RI persiapan tentang pelantikan ini,” ujar Azis kepada para wartawan.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menjelaskan, ke depannya secara jelas mengenai pelantikan Presiden dan Wapres akan dirapatkan secara lebih detail lagi dengan Pemerintah, dalam hal ini Sekretariat Negara (Setneg) untuk melakukan pembahasan sesuai arahan Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Sesuai arahan Ibu Puan, dalam waktu dekat kami ada rapat teknis dengan Setneg. Kemarin, kami sudah melakukan pembahasan secara awal di tingkat Pimpinan yang dihadiri Pak Rachmad Gobel, Pak Sufmi Dasco, saya sendiri dan Ibu Puan untuk melakukan pembahasan secara awal. Nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan pembahasannya itu,” pungkas politisi Partai Golkar ini. ■ pun/sf



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Azis Syamsuddin. Foto: Gerald/HR

Penetapan Pimpinan AKD Berlangsung Dinamis



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Runi/HR

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, penentuan pimpinan dan alokasi kursi untuk Fraksi-Fraksi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih berlangsung dinamis. Menurutnya, masih perlu dilakukan lobi-lobi antarfraksi agar mencapai musyawarah mufakat dan proporsional sesuai metode penghitungan yang berlaku.

“Kalau kemarin itu bukan soal tarik-menarik Komisi, tetapi karena ada pembulatan-pembulatan

yang kemudian dianggap mesti dikonsultasikan. Sehingga kita memberikan waktu kepada kawan-kawan untuk berkonsultasi dengan fraksi-fraksi masing-masing,” jelas Sufmi ketika ditemui wartawan di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, penentuan pimpinan AKD di periode ini berbeda dengan periode sebelumnya. Kini, aturan terkait alokasi kursi di pimpinan di AKD tidak lagi sistem paket, melainkan proporsionalitas.

Metode proporsional ini diyakini dapat mewakili suara rakyat karena berdasarkan komposisi perolehan suara partai politik dalam Pemilu 2019 dan jumlah kursi di DPR RI.

Sementara saat ditanyai target AKD yang diinginkan Fraksi Partai Gerindra, menurutnya saat ini masih belum ada AKD khusus yang diincar. Namun, tak menutup kemungkinan Fraksinya mengambil Komisi yang bersentuhan langsung dengan rakyat. “Gerindra akan mengambil Komisi atau AKD yang mana belum ada keputusan, sehingga kita masih konsultasikan dengan internal partai,” jelasnya. ■ **ann/sf**

BPJS Kesehatan Harus Perbaiki Kinerja Manajemen

Pemerintah berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun 2020 itu menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong setiap aspek dalam kinerja manajemen BPJS harus diperbaiki.

Perbaikan kinerja tersebut, ungkap Puan, sejalan dengan hasil kesimpulan rapat terakhir yang dilakukan antara BPJS Kesehatan,

perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Keuangan dengan Komisi IX DPR RI pada periode 2014-2019 yang lalu.

“Rapat konsultasi saat itu antara Kemenkeu, perwakilan Kemenko PMK dan BPJS Kesehatan dengan Komisi IX periode yang lalu ada beberapa kesimpulan yang menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja manajemen BPJS harus diperbaiki,” ujar Puan, saat ditemui *Parlementaria* di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Namun demikian, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V ini menyatakan akan menanyakan perihal kepastian kenaikan iuran BPJS itu kepada Pemerintah. Puan menjelaskan kepastian itu baru akan dapat dilakukan jika Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI sudah terbentuk.

“Kalau sudah terbentuk Komisi dan AKD, saya akan mendengarkan lagi masukan itu sudah sampai mana. Sampai hari ini, rencana tersebut baru akan dilakukan nanti pada 1 Januari (2020),” pungkas eks-Menko PMK itu.

■ pun/sf



Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Kresno/HR

Negara Harus Lebih Perhatikan PTS dan Sekolah Swasta

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Nuroji menilai perguruan tinggi swasta di Indonesia perlu lebih mendapat perhatian dari negara, dalam hal ini pemerintah. Sesuai dengan Pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

“Sesuai amanat undang-undang, di mana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sehingga, baik itu sekolah atau perguruan tinggi swasta maupun negeri tetap harus mendapat perhatian dari negara dalam hal ini pemerintah. Namun saya melihat perguruan tinggi swasta saat ini belum mendapat perhatian dari negara. Padahal, jumlah dari perguruan tinggi maupun sekolah swasta di Indonesia sangat banyak,” kata Nuroji kepada **Parlementaria** di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Artinya, lanjut Nuroji, banyak anak bangsa yang juga sedang mengenyam pendidikan di tempat tersebut (perguruan tinggi dan sekolah swasta). Dengan kata lain, perguruan tinggi maupun sekolah swasta juga memberikan sumbangsih dalam mencerdaskan bangsa. “Jadi, sudah selayaknyalah (lembaga pendidikan) swasta juga harus mendapat perhatian lebih dari negara,” ujar Nuroji.

Salah satu perhatian dari pemerintah yang dimaksud Nuroji adalah berupa pemberian beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa berprestasi, terlebih prestasinya tersebut dalam lingkup internasional yang membawa harum nama bangsa. Belum lagi perhatian berupa dukungan penyediaan alat-alat pendidikan yang diperlukan.

Pemerintah seharusnya juga ikut “campur tangan” terhadap hal tersebut,

meskipun sekolah yang dimaksud merupakan sekolah swasta. Nuroji berharap ke depan pemerintah harus lebih memperhatikan dan memberi dukungan terhadap sekolah dan perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia.

Sementara itu, terkait dengan adanya demonstrasi oleh siswa SMK beberapa waktu lalu, Nuroji menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Pasalnya, usia siswa SMK sudah tidak bisa dikatakan anak-anak lagi karena sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sudah memiliki hak politik untuk memilih. Sehingga, hal tersebut tidak bisa dikatakan eksploitasi anak.

“Usia anak SMK itu menurut saya sudah bukan anak-anak dalam undang-undang, ya. Sudah punya KTP, sudah punya hak pilih dalam pileg dan pilpres kemarin. Jadi saya yakin mereka juga punya cara pandang sendiri dalam melihat berbagai permasalahan di tanah air. Jadi kalau mereka berdemo, ya wajar saja menurut saya apalagi di era demokrasi. Tidak bisa itu dikatakan

eksploitasi,” ujar legislator dapil Jawa Barat VI ini sambil menyesalkan adanya penangkapan oleh kepolisian terhadap siswa SMK yang ingin berdemonstrasi.

“Di Depok siswa SMK yang ingin demonstrasi ditangkap, *gimana* itu? Itu hak politik mereka loh. Kalau masalah bolos, itu disiplin yang menjadi tanggung jawab sekolah, tidak ada kaitan dengan polres atau polisi. Kecuali mereka anarkis. Tapi ini kan mereka baru berangkat, sudah ditangkap. Seharusnya yang berperan, ya sekolah dalam membina siswanya supaya berunjuk rasa dengan baik, tidak anarkis,” paparnya.

Dengan kata lain, Nuroji juga mengaku tidak setuju jika demonstrasi berujung aksi yang anarkis dan destruktif atau merusak.

Hal tersebut selain bukan sebuah perilaku terpuji juga akan memunculkan mental yang tidak baik bagi perkembangan anak.

■ ayu/es

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nuroji.
Foto: Oji/HR



Calon Menteri Harus Profesional dan Berintegritas



Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI Imam Suroso. Foto: Gerald/HR

Pembentukan kabinet tinggal menunggu waktu. Pengumuman para calon menteri yang masuk kabinet sedang dinanti publik. Diharapkan para menteri yang akan membantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama menjalankan roda pemerintahan periode 2019-2024 nanti adalah orang-orang yang profesional dan berintegritas.

"Bagus sekali orang-orang profesional dan berintegritas masuk kabinet. Selain itu, menteri yang

masuk kabinet harus mau berlelah-lelah mengikuti ritme kerja Pak Jokowi sebagai Presiden," kata Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI Imam Suroso saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10). Dan kaum profesional yang berintegritas itu, kata Imam, banyak pula yang berasal dari partai politik.

Para menteri, seru Imam, harus pula menguasai bidang kerjanya masing-masing. Tantangan ke depan yang tidak mudah menuntut para menteri bekerja ekstra keras merealisasikan program-program pro rakyat. "Yang

”

YANG PENTING JUGA SEMANGAT KERJANYA HARUS TINGGI. SYUKUR BILA LATAR KEAHLIANNYA SESUAI PENEMPATANNYA. MENTERI YANG DITUNJUK HARUS TAHU YANG DIKERJAKAN. INI UNTUK KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA

penting juga semangat kerjanya harus tinggi. Syukur bila latar belakang keahliannya sesuai penempatannya. Menteri yang ditunjuk harus tahu yang dikerjakan. Ini untuk kemajuan bangsa dan negara," urai legislator dapil Jateng III itu.

Sementara mengomentari kaum muda yang akan diakomodir oleh Presiden Jokowi dalam kabinet nanti, pria asal Pati, Jateng ini, mengatakan, kaum muda bisa saja masuk kabinet asal mampu bekerja. Namun, akhirnya tergantung Presiden Jokowi jua, karena ia punya hak prerogatif untuk memilih para pembantunya.

"Mudah-mudahan parpol bisa mengirim orang-orang profesional yang memiliki rekam jejak sangat baik, bebas dari korupsi. PDI-Perjuangan juga punya banyak tokoh profesional. Apalagi PDI-Perjuangan sudah bekerja maksimal mengusung Jokowi-Ma'ruf menjadi pemimpin nasional," tutup Anggota Komisi IX DPR periode 2014-2019 itu. ■ mh/sf

Dyah Roro Ingin Perjuangkan Isu Lingkungan Berkelanjutan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terpilih Periode 2019-2024 Dyah Roro Esti Widya

Putri ingin memperjuangkan isu-isu terkait lingkungan berkelanjutan (*sustainability*). Ia ingin memperjuangkan aspirasi agar bagaimana ke depannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini bisa sejahtera tapi tidak lupa dengan kesehatan lingkungan.

“Tentunya, saya akan menyuarakan bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa sejahtera tapi tidak melupakan lingkungannya,” ujar Dyah Roro saat ditemui *Parlementaria* usai menghadiri Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR RI periode 2019-2024, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Dyah Roro yang merupakan salah satu politisi muda (milenial) ini berharap dapat ditugaskan di Komisi VII DPR RI agar nantinya bisa secara maksimal mewujudkan visi misinya tersebut. Seperti diketahui, Komisi VII DPR RI membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan riset dan teknologi.

“*Background* saya pendidikan S1 di University of Manchester mengambil jurusan ekonomi dan sosiologi. Kemudian, S2 di Imperial College London dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) beasiswa dari negara Kementerian Keuangan. Kemudian, berawal dari sinilah saya terpanggil untuk mengabdikan,” ungkap politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Legislator dapil Jawa Timur X tersebut menjelaskan, penggabungan aspek

”

**SAYA AKAN
MENYUARAKAN
BAGAIMANA
NEGARA KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA INI BISA
SEJAHTERA TAPI
TIDAK MELUPAKAN
LINGKUNGAN**

sosial-ekonomi dan lingkungan sangat penting untuk dilakukan. “Ketika nanti saya masuk Komisi VII, saya berharap untuk bisa menyongsong isu-isu terkait *sustainability* tentunya bagaimana NKRI ini bisa sejahtera tapi tidak lupa dengan lingkungan. Jadi paduan antara *people planet* dan *profit*,” pungkasnya. ■ pun/es

Anggota Fraksi Partai
Golkar DPR RI Dyah Roro
Esti Widya Putri.
Foto: Dep/HR



Perlu Dialog Komprehensif dan Inklusif Tangani Konflik Papua

Sejak 19 Agustus 2019, tanah Papua dan Papua Barat kembali bergejolak. Gelombang aksi unjuk rasa terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih, yang sebagian disertai pula dengan aksi kerusuhan. Terkait hal tersebut, Anggota DPR RI Rofik Hananto mengatakan, perlu dibangun dialog yang komprehensif dan inklusif dalam menangani konflik yang terjadi di Provinsi Papua.

“Jika dialog yang komprehensif dan inklusif berhasil diaplikasikan pada Konflik Papua, maka bukan hanya pada saat proses penyelesaian konflik upaya membangun *trust* dilakukan, namun pada saat dan sesudah kesepakatan perdamaian dicapai pun, *trust* harus dirawat dan dijaga,” ujar Rofik dalam rilisnya, baru-baru ini.

Lebih dari itu, sambungnya, tindak lanjut atas kesepakatan perdamaian harus terus ditegakkan. Menurutnya, Papua harus dibangun dari seluruh arah dan elemen serta oleh seluruh kalangan. Penegakan hukum, pembangunan ekonomi, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan-pembangunan lain di segala sektor harus terus dilakukan, agar

Papua dapat merasa bangga bersama NKRI.

“Dialog Aceh yang berhasil mengakhiri konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan TNI merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk mengupayakan dialog yang semacamnya di Papua. Dengan belajar dari Kasus Aceh, dialog juga dapat dilakukan untuk Papua,” terangnya.

Pemerintah, lanjut Rofik, dapat menggunakan pendekatan personal dengan menunjuk aktor di belakang layar dan melakukan *second track diplomacy* dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator

atau negosiator. Kedua pendekatan ini bertujuan membuka komunikasi dan membangun *trust* di kalangan pro-kemerdekaan Papua terhadap Pemerintah Indonesia maupun sebaliknya,” papar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dikatakannya, pendekatan koersif yang dilakukan pemerintah dalam menangani konflik di Papua memang menjadi banyak perhatian dan perdebatan dari berbagai kalangan termasuk dunia internasional. Pemerintah memang tidak salah dalam menggunakan pendekatan tersebut, namun seharusnya bukan satu-satunya jalan, harus dibarengi langkah-langkah lain secara komprehensif.

Tujuan pertahanan dan keamanan daerah, jelas Rofik, seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan sosial di daerah tersebut. Pembangunan kondisi keamanan merupakan upaya kolektif jangka panjang, maka seharusnya menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama. Dalam beberapa kasus, pendekatan koersif, termasuk militer dan pengawasan yang ketat terhadap komunitas tertentu, justru malah dapat membuat gerakan kelompok tersebut semakin berkembang, termasuk dapat mengakibatkan banyak korban sipil.

“Ketika pemerintah hanya fokus menyelesaikan konflik melalui pendekatan koersif, memang menyelesaikan permasalahan namun tidak akan bertahan lama. Ketika tersulut, maka akan memanas kembali, karena sebenarnya akar utama masalah belum selesai,” tutur Rofik. ■ dep/es



Anggota Fraksi PKS DPR RI Rofik Hananto. Foto: Dok/HR

Legislator Dorong Sekolah Ajukan Renovasi ke Pemerintah

Pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata. Selain kesejahteraan para guru honorer melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kebutuhan fasilitas sekolah juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Anggota DPR RI terpilih Periode 2019-2024 Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah membuat langkah terobosan masalah sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia.

Untuk itu, bagi sekolah yang memerlukan perbaikan gedung atau penambahan fasilitas baru segera melakukan pengajuan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hetifah menyatakan, renovasi saat ini menggunakan model revitalisasi sekolah. “Artinya, renovasi akan berjalan lebih fokus dan tuntas. Nanti kementerian menindaklanjuti kebutuhan apa yang harus diprioritaskan,” ujar Hetifah dalam rilisnya kepada **Parlementaria**, Senin (7/10).

Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menjelaskan, jika ada satu sekolah yang memerlukan ruang kelas baru dan renovasi fasilitas lain, perbaikan akan dilakukan secara total. Hetifah mengungkapkan, perbaikan model revitalisasi sekolah seperti itu sudah berjalan pada tahun ini dan ia mendorong



Anggota Fraksi Golkar DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Singgih/HR

seluruh tingkatan sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta juga segera melakukan pengajuan agar dapat segera direvitalisasi.

“Kebijakan ini mendorong agar perbaikan sekolah di daerah bisa lebih optimal dan tuntas. Apalagi dengan adanya sistem zonasi, pemerintah ingin membuat kualitas pendidikan merata di seluruh wilayah hingga ke pelosok,” tandas Pimpinan Komisi X

DPR RI Periode 2014-2019 itu.

Menurut legislator dapil Kalimantan Timur ini, kebijakan ini baru mulai diterapkan pada tahun 2019 ini. Diharapkan sekolah bisa bersabar menunggu giliran perbaikan sarana dan prasarananya. “Karena kan biasanya kalau bantuan sedikit-sedikit jadi hanya seperti tambal sulam. Jadi sekarang bisa tuntas,” pungkas Hetifah. ■ pun/sf

Marthen Douw Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Papua



Anggota Fraksi PKB DPR RI Marthen Douw. Foto: Dep/HR

Anggota DPR RI periode 2019-2024 Marthen Douw mengatakan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua yang diwakilinya. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Papua terpilih, ia menyatakan siap menjalankan amanah rakyat dengan sepenuh hati.

“Sebagai wakil rakyat dari Papua, saya (adalah) Papua. Saya pergi (ke Senayan) untuk kembali (ke Papua). Pergi memperjuangkan aspirasi dan

kembali untuk rakyat Papua,” tegas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ketika menjawab pertanyaan **Parlementaria** terkait visi-misinya sebagai wakil rakyat, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Dunia politik memang bukan hal yang baru bagi politikus kelahiran Nabire, Papua ini. Meski terbilang masih muda yaitu 29 tahun, Marthen pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Nabire periode 2014 - 2019. Berbekal 151.994 perolehan suara di

dapil Papua, Marthen menyatakan siap menjalankan amanah sepenuh hati.

Selama 5 tahun ke depan, Marthen akan fokus terhadap isu-isu terkait Papua seperti masalah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengembalikan hak dan martabat masyarakat Papua. Ia juga berharap, diberikan ruang untuk aspirasi masyarakat Papua dan kesempatan yang sama seperti lainnya bisa terwujud. “Di Papua banyak persoalan, ya karena persoalan itu saya pergi untuk kembali,” tandasnya. ■ ann/sf

Menteri Terpilih Harus Mampu Memimpin

Jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI dan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober ini, muncul perbincangan soal pembentukan kabinet dan tokoh yang menjadi menteri pada lima tahun mendatang. Menteri tidak saja dituntut mampu menjalankan tugas, tapi juga yang lebih penting adalah mampu memimpin. Itulah sosok menteri ideal.

Anggota DPR RI dari F-PDI Perjuangan Marinus Gea berkomentar, sejatinya seorang menteri adalah juga seorang pemimpin, karena memang harus memimpin kementerian dan banyak pegawai. Ini disampaikan Marinus saat dimintai komentarnya terkait pembantu presiden lima tahun mendatang melalui jaringan pesan singkat (*Whatsap*) kepada

Parlementaria, Selasa (8/10).

“Menteri itu bukan hanya bertugas untuk menciptakan ide, tetapi juga harus mampu memimpin. Pengalaman sangat penting dalam memimpin,” tutur legislator dapil Banten III tersebut. Ia berharap, Presiden terpilih Jokowi mengangkat para menterinya yang betul-betul mendukung pemerintahan untuk kepentingan rakyat.

Menjawab wacana partai oposisi yang akan masuk kabinet, Marinus

mengatakan, belum tahu persis wacana tersebut. Yang jelas, sambung Marinus, Presiden Jokowi sudah punya pertimbangan sendiri siapa saja yang layak masuk kabinetnya.

“Kita percayakan kepada Pak Jokowi. Kalaupun ada (oposisi masuk kabinet), tentu Pak Jokowi sudah mempertimbangkan dengan baik dalam berbagai aspek, dan juga kita harapkan mempertimbangkan kepada seluruh partai-partai pendukung,” ujarnya. ■mh/es

”

MENTERI ITU BUKAN HANYA BERTUGAS UNTUK MENCIPTAKAN IDE, TETAPI JUGA HARUS MAMPU MEMIMPIN. PENGALAMAN SANGAT PENTING DALAM MEMIMPIN



Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI Marinus Gea. Foto: Ayu/HR

Legislator Minta Presiden Terpilih Datang ke Wamena

Anggota DPR RI dapil Sumatera Barat II Nevi Zuairina meminta presiden terpilih yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI, agar segera turun langsung ke Wamena, Papua, sebelum dilantik sebagai Presiden 5 tahun yang akan datang. Menurutnya, Presiden mesti berdialog guna mengetahui apa yang menjadi keinginan warga demi meredam kerusuhan serta menyelamatkan warga pendatang dari ketakutan dan ancaman.

“Kita meminta Presiden (terpilih) hadir langsung di Wamena menemui warga sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober yang akan datang. Yakinkan warga di Wamena bahwa pemerintah turut andil dalam menyelesaikan masalah besar ini, kemudian menjamin keselamatan, menghentikan segala ketakutan dan ancaman,” ucap Nevi dalam berita rilisnya kepada **Parlementaria**, baru-baru ini.

Datangnya Presiden terpilih ke Wamena, lanjut Nevi, sebagai pewujudan bahwa Presiden mendengar aspirasi secara langsung dari warga untuk menyelesaikan segala permasalahan. Pemerintah hadir untuk memunculkan kedamaian dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama di seluruh wilayah Indonesia.

Nevi mengatakan, banyak warga pendatang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Papua, namun sebab kerusuhan itu masih banyak yang simpang-siur, sehingga warga di sana banyak mengalami trauma karena ketakutan. “Banyak warga dari luar daerah yang merasa sudah bersaudara dengan penduduk asli Wamena mengalami trauma akibat kerusuhan yang terjadi. Trauma ini begitu mengerikan sehingga banyak warga yang terpaksa kembali pulang ke

kampung asal,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.

Seperti dikabarkan, kerusuhan di Wamena telah menimbulkan sejumlah korban jiwa termasuk perantau Minang, Sumatera Barat. Sementara, sejak terjadi kerusuhan pertengahan September lalu, hingga awal Oktober tercatat ribuan orang telah meninggalkan Wamena. Tak hanya korban jiwa, fasilitas pemerintah juga banyak mengalami kerusakan salah satunya Kantor Bupati Wamena hangus terbakar, juga kios-kios di pasar dan lainnya.

Menurut Nevi, prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelamatkan warga dari segala ancaman. Apabila butuh evakuasi warga, segera lakukan ke tempat yang aman, intinya pemerintah harus cepat tanggap.

Nevi berharap dalam kerusuhan segera ditindak tegas agar kondisi di Wamena bisa kembali normal dan damai. Pemerintah perlu benar-benar serius untuk mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan di Papua sehingga efektifitas menyelesaikan akar masalah Papua secara fundamental dapat dilakukan secara cepat.

“Presiden sebaiknya mengambil langkah cepat, cermat, dan terukur untuk mengendalikan situasi keamanan di Wamena. Tanggung jawab penuh dengan seluruh kekuatan, upaya dan biaya dilakukan, agar tidak ada lagi korban. Jangan sampai ada lagi korban jiwa satupun. Harus ada jaminan pemerintah akan keamanan dan kedamaian yang merupakan kebutuhan mendasar rakyat,” pungkasnya. ■ dep/es



Anggota F-PKS DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Dok/HR

Anggota DPR Harus Jaga Amanah Rakyat



KE DEPAN KITA JUGA HARUS MEMPERERAT KETERLIBATAN RAKYAT TERHADAP SEMUA PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. SEHINGGA, KEBIJAKAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEHENDAK PUBLIK

Kinerja DPR RI kerap mendapat kritik dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Untuk itu, 575 wakil rakyat Periode 2019-2024 yang telah diambil sumpah/ janjinya pada 1 Oktober 2019 lalu harus bergandengan tangan melakukan perubahan bagi negara dan bangsa ke arah yang lebih baik, serta menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan.

“Jangan sampai tumbuh sikap apatis dari publik terhadap lembaga DPR RI. Anggota DPR terpilih Periode 2019-2024 harus memegang teguh janji dan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang amanah. Apa yang disuarakan rakyat belakangan ini harus menjadi perhatian,” ungkap Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Delmeria Sikumbang, saat

ditemui *Parlementaria*, baru-baru ini.

Anggota Fraksi Partai NasDem ini menambahkan, proses komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyatnya juga perlu dibenahi, untuk menumbuhkan kembali rasa optimis

rakyat terhadap wakil rakyatnya yang baru. “Ke depan kita juga harus mempererat keterlibatan rakyat terhadap semua proses pembuatan kebijakan publik. Sehingga, kebijakan publik sesuai dengan kehendak publik,” tuturnya.

Delmeria berjanji akan tetap amanah mengemban aspirasi rakyat yang diwakilinya di daerah pemilihan Sumatera Utara II. Delmeria berhasil memperoleh suara sebanyak 68.097 suara pada Pemilihan Legislatif 2019 lalu. Perolehan suara tersebut berhasil mengantarkan Delmeria menjadi Anggota DPR Periode 2019-2024. ■ rmm/sf

Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI
Delmeria Sikumbang. Foto: Dok/HR



Kabinet Diharapkan Lebih Berwarna

Komposisi para menteri dalam kabinet yang akan datang diharapkan lebih berwarna dari berbagai latar partai politik dan keahlian. Para menteri pilihan Presiden juga dituntut mampu mengeksekusi program-program dan ide Presiden Joko Widodo. Tentu harapannya kabinet kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya.

Demikian penuturan Anggota

F-PDI Perjuangan DPR RI Arteria Dahlan kepada *Parlementaria* yang ditemui usai rapat koordinasi F-PDI Perjuangan DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10). “Yang jelas sang menteri harus orang eksekutorial. Terakhir, Pak Presiden menyaratkan ada beberapa menteri dari kaum milenial. Itu berarti Pak Presiden mengharapkan kabinet ini pelangi atau berwarna,” ujar Arteria.

Milenial yang penuh gagasan baru,



PRESIDEN BUTUH ORANG-ORANG YANG KOMPETEN DAN PUNYA KAPASITAS. CALON MENTERI HARUS MEMAHAMI BETUL DAN MAMPU MENGEKSEKUSI PROGRAM-PROGRAM KEINGINAN PRESIDEN SECARA KONKRET

inovatif, dan kreatif memang bisa masuk kabinet. Menurut legislator dapil Jawa Timur VI ini, bergabungnya kaum milenial ke dalam kabinet diharapkan mampu menguatkan kabinet bentukan Presiden terpilih. “Presiden butuh orang-orang yang kompeten dan punya kapasitas. Calon menteri harus memahami betul dan mampu mengeksekusi program-program keinginan Presiden secara konkret,” tandasnya.

Ketika ditanya soal mengakomodir partai oposisi, Arteria menjawab, prinsipnya semua jadi hak prerogatif Presiden. Bila Presiden ingin mengakomodir partai oposisi, kata Arteria, tentu harus dihormati. PDI-Perjuangan sendiri, lanjut mantan advokat ini, tidak ingin membebani Presiden Jokowi dengan berbagai keinginan soal kabinet yang akan dibentuk.

“Berkali-kali ditegaskan, kami menghormati apapun sikap dan kebijakan yang diambil Presiden terkait pengisian jabatan menteri di kabinet. Kami tidak mau memberi kewajiban khusus bagi Presiden untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi. Sekarang saja memilih itu hal yang sulit. Banyak sekali putra-putri terbaik bangsa yang layak untuk dihadirkan. Presiden harus berpikir ekstra, siapa saja yang harus dia pilih. Jadi, kita hormati betul,” pungkasnya.

■ mh/sf



Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI Arteria Dahlan. Foto: Arief/HR

Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Gagal Panen

Anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan II Andi Akmal Pasluddin mengatakan, kemarau berkepanjangan di tahun 2019 ini telah menimbulkan kekeringan di hampir menyeluruh wilayah Tanah Air. Bahkan di beberapa wilayah, kekeringan ini memicu kebakaran lahan, kesulitan air bersih, kebakaran hutan, hingga juga ada beberapa wilayah yang kekeringan ini mengakibatkan gagalnya panen atau puso.

Anggota Komisi IV DPR RI pada periode 2014-2019 ini meminta kepada pemerintah agar melakukan antisipasi manajemen stok pangan yang baik akibat gagal panen yang saat ini menimpa sejumlah daerah dalam waktu 1 bulan ke depan khususnya di wilayah Sulsel, seperti di Bone, Bulukumba, Wajo, Pangkep, dan Maros.

“Musim kekeringan yang berkepanjangan ini membuat lahan padi yang gagal panen atau puso

melonjak tajam tahun ini. Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah taktis untuk mengendalikan harga beras pada bulan depan yang diduga akan bergejolak,” imbau Akmal dalam rilis yang diterima Parlemen, Kamis (10/10).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, data yang ia terima dari beberapa sumber mengatakan, telah terjadi kekeringan pada luasan lahan pertanian yang meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Lahan pertanian yang terpapar puso mencapai hingga 70 ribu hektare (ha).

“Angka ini meningkat tajam bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 30 ribu hektar. Selain kegagalan panen yang mengurangi jumlah stok pangan nasional, juga telah memicu para petani menanam komoditas non beras, sehingga pasokan beras di gudangnya kosong. Akibatnya, petani beras menjadi konsumen beras,” paparnya.

Ia menambahkan, data Kementerian Pertanian pun menunjukkan bahwa, lahan padi yang puso akibat kekeringan mencapai 31 ribu ha hingga Juli 2019. Begitu luasnya lahan yang puso tersebut, menunjukkan bahwa area gagalnya paling luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana tahun lalu sekitar 26-28 ribu ha.

“Meski saat ini sudah mulai terlihat akan segera masuk musim penghujan, namun akibat kekeringan ini saya berharap kepada pemerintah tidak melakukan impor beras secara besar-besaran. Kita akan melihat kinerja pemerintah satu bulan ke depan apakah mampu mengatasi manajemen stok pangan, atau malah melakukan impor beras,” tutup Akmal.



Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Arief/HR

■ dep/sf

Perjuangkan Keberimbangan Anggaran untuk Daerah

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Syahrul Aidi Maazat bertekad akan memperjuangkan keberimbangan anggaran bagi daerah, seperti halnya yang diterima Provinsi Riau, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan daerah tersebut.

“Banyak hal yang ingin saya perjuangkan untuk rakyat dan daerah yang saya wakili. Tentu semua itu disesuaikan dengan *platform* partai saya. Yang paling utama saya akan memperjuangkan dan menyangkut hajat hidup masyarakat di daerah pemilihan saya yaitu adanya perimbangan keuangan atau anggaran dari pusat ke Provinsi Riau dengan PAD yang kami hasilkan di Riau,” ujar Syahrul kepada **Parlementaria** di Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Politisi yang berasal dari dapil Riau II ini menilai apa yang didapat Provinsi Riau saat ini dari Pemerintah Pusat, tidak sebanding apa yang dihasilkan Riau melalui PAD

nya. Menurut Syahrul, Riau merupakan daerah penghasil gas dan minyak bumi terbesar di Indonesia. Belum lagi hasil perkebunan seperti karet dan kelapa sawit yang minyaknya ikut diekspor.

Sementara hasil yang diterima Riau dari pemerintah pusat sangat sedikit. Sebut saja infrastruktur yang masih belum memadai, jalan-jalan rusak,

bangunan sekolah kondisinya yang cukup menyedihkan. Bahkan, tidak sedikit pula desa yang hingga saat ini belum teraliri atau belum tersentuh listrik. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan dan bertolak belakang dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sudah sangat canggih.

“Riau itu penghasil gas bumi dan minyak bumi terbesar. Riau juga penghasil dan pengespor minyak sawit (CPO) yang semua itu ijin, pajak ekspor dan sebagian diambil oleh pemerintah pusat. Sementara Pemprov Riau hanya mendapatkan Pajak Bumi dan Bangunan saja. Namun dana atau anggaran yang diterima Riau dari pusat tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan,” tekannya.

Sampai hari ini, lanjutnya, bisa dikatakan pembangunan di Riau masih sangat minim. “Oleh karena itulah ke depan saya akan memperjuangkan keberimbangan anggaran dari pusat dengan PAD yang dihasilkan Riau. Semua itu demi kesejahteraan rakyat Riau dan pembangunan yang ada di Riau,” paparnya sambil berharap dukungan serupa dari para koleganya di DPR RI.

■ ayu/es



Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Syahrul Aidi Maazat. Foto: Runi/HR

Perlu Kehati-hatian dalam Menyusun Produk Legislasi



Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI R. Imron Amin. Foto: Sofyan/HR

Anggota DPR RI Periode 2019-2024 R. Imron Amin menilai, DPR RI dalam membuat produk legislasi memang diperlukan kehati-hatian, karena masyarakat masa kini dianggapnya semakin cerdas dalam mengikuti alur pembuatan undang-undang. Sehingga tragedi imbas dari pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat menjadi pelajaran ke depan dalam menghasilkan produk legislasi yang dapat memuaskan masyarakat.

“Pemerintah dan DPR akan menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk menciptakan kebijakan-

kebijakan yang baik bagi masyarakat demi terciptanya kondusifitas di Indonesia ini. Sehingga, perlu diatur kembali kehati-hatian dan tidak grasak-grusuk dalam menelurkan produk-produk legislasi,” pungkas politisi Partai Gerindra itu kepada *Parlementaria* di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Politisi berlatar belakang pendidikan hukum ini mengaku simpati kepada para demonstran dan aparat yang saling berjibaku satu sama lain karena harus mempertahankan nilai yang menurut mereka benar. Menurutnya, disinilah peran para wakil rakyat diuji yaitu lewat pengkajian ulang undang-undang yang dianggap bermasalah. Untuk itu ia bertekad mendorong

pemerintah untuk mengkaji ulang revisi UU KPK dan pembahasan RKUHP. Ia menilai suara masyarakat merupakan satu elemen penting untuk menilai sebuah nilai benar atau salah.

“Mereka (demonstran) sampai harus melawan gas air mata satu sama lain. Kita lihat nanti, kita ikuti dulu kelanjutannya karena kalau UU KPK kan sudah ada di Presiden, sedangkan RKUHP pada akhirnya telah ditunda. Itu yang nanti kita akan coba fokuskan dan kita kaji lagi. Kita libatkan orang-orang yang merasa ini perlu ditunda. Dari hal itu masyarakat nanti bisa melihat bahwa para wakil rakyat ini bersungguh-sungguh untuk menghasilkan produk legislasi yang baik untuk rakyat,” ujar legislator dapil Jawa Timur XI itu. ■ *er/sf*

Tata Beracara Jadi Poin Penting Kode Etik Kedewanan



Kepala Biro Persidangan II Setjen dan BK DPR RI Choldia Indrayana menerima kunjungan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Foto: Arief/HR

Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Choldia Indrayana menyatakan, membuat tata beracara di dalam kode etik kedewanan merupakan hal yang penting. Mengingat tata beracara merupakan aturan pelaksanaan yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti setiap aduan yang diterima oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atau Badan Kehormatan DPRD.

“Bagaimana bisa menindak Anggota untuk melaksanakan pengaduan tersebut atau ingin menindaklanjuti kalau tidak ada tata beracaranya. Karena itu adalah pelaksanaan untuk melakukan kode etiknya,” katanya usai menerima kunjungan konsultasi Anggota Panja Kode Etik DPRD Provinsi Bengkulu terkait tata kelola kode etik kedewanan, di Ruang Rapat Biro Persidangan II, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

lin, biasa ia disapa menambahkan, jika kode etik tidak memiliki tata beracara, maka hal itu sia-sia. Hal itu terbukti dari banyaknya DPRD-DPRD di Indonesia yang tidak dapat memproses kasus-kasus atau aduan terhadap etika kedewanan, disebabkan tidak adanya aturan untuk melakukan penindakan maupun pencegahan. Sehingga, menurutnya pembuatan tata beracara dapat dilakukan sekilas setelah pembuatan kode etik, karena tata beracara merupakan hal yang cukup *urgent*, harus ada dalam pengaturan kode etik kedewanan.

Sebagai contoh, lin menjadikan kinerja MKD DPR RI periode 2014-2019 yang dinilai cukup guyub dalam melaksanakan tata beracara kode etik kedewanan. “Dalam pelaksanaan tata beracara dan kode etik dijalankan betul-betul. Untuk periode yang datang, syukur-syukur kalau masih ada (anggota petahana) yang menjadi anggota lagi di MKD, diharapkan bisa menyampaikan

hal-hal yang sudah dilakukan 1 periode lalu untuk menjadi lebih baik lagi dan yang bagus ini dipertahankan. Itu harapan kita,” tuturnya.

Sementara Ketua Tim Panja Kode Etik DPRD Provinsi Bengkulu Suheimi Pales mengatakan, dirinya akan menerapkan hasil konsultasi tersebut di DPRD Provinsi Bengkulu, mengingat DPR RI sendiri mengatur etika 575 Anggota Dewan, sehingga dirinya meyakini akan mengaplikasikan apa yang telah dilakukan DPR RI. Terkait tata beracara, ia dan Panja Kode Etik DPRD Bengkulu akan menyelesaikan lebih dahulu penyusunan kode etiknya, mengingat itu adalah dasar hukum dari etika kedewanan.

“Tentu kita akan menyelesaikan dulu terkait dengan kode etik. Kode etik itu kan aturan hukumnya dan terkait tata beracaranya itu pelaksanaan dari kode etik itu sendiri. Setelah kode etik ini selesai kita akan membahas terkait dengan tata beracaranya,” tutup Suheimi. ■ ndy/sf

DPR Pastikan Keamanan Kompleks Parlemen Jelang Pelantikan Presiden

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang, jajaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mendampingi Pimpinan DPR RI melakukan tinjauan *on the spot* di sejumlah titik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Tinjauan diawali dengan mengunjungi Media Center DPR RI di Gedung Nusantara III, sekaligus berbincang dengan para wartawan yang bertugas di Parlemen.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani beserta Pimpinan DPR RI lainnya ingin memastikan Kompleks Parlemen dikelola dan dirawat dengan baik sesuai aturan yang benar. Selain itu, menjelang pelantikan Presiden dan Wapres, Indra mengungkapkan bahwa Pimpinan DPR RI juga memberikan dukungan dan semangat penuh kepada seluruh petugas keamanan, baik Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI, TNI maupun Polri.

“Dalam rangka persiapan pelantikan Presiden, Ibu Ketua ingin memberikan



Sekjen DPR RI Indra Iskandar mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pengamanan jelang pelantikan Presiden di Kompleks Parlemen. Foto: Gerald/HR



MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN SEMANGAT PADA SEMUA PETUGAS, BAIK TNI DAN POLRI, UNTUK TETAP MENJAGA SEMANGAT DAN KINERJA, KARENA ITU BAGIAN DARI PENGABDIAN KITA SEMUA

dukungan dan semangat pada semua petugas, baik TNI dan Polri, untuk tetap menjaga semangat dan kinerja, karena itu bagian dari pengabdian kita semua,” katanya sembari menambahkan jika disela-sela pemberian dukungan kepada petugas keamanan, Pimpinan DPR RI juga melakukan diskusi dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, sebagai bentuk silaturahmi sebagai Pimpinan DPR RI yang baru kepada awak media.

Indra juga mengutarakan, tinjauan yang dilakukan Pimpinan DPR RI dan pertemuan dengan para petugas keamanan di Kompleks Parlemen, untuk meyakinkan masyarakat bahwa jelang pelantikan Presiden dan Wapres, kondisi Kompleks Parlemen terlihat aman, damai dan tertib. “Tidak ada larangan untuk berdemo, tapi lakukan itu dengan baik, karena kita semua ingin agar semuanya bisa dilaksanakan dengan sama-sama menghargai,” tutupnya. ■ ndy/sf



Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel serta Sekjen DPR RI mengakhiri tinjauan pengamanan Kompleks Parlemen, di Pujasera DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Foto: Kresno,Runi/HR



Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indrayana menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Tanggamus dan DPRD Bengkulu, Kamis (10/10). Foto: Oji/HR



Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menerima DPRD Kabupaten Nias terkait mekanisme pembahasan APBD 2020 di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Rabu (9/10). Foto: Azka/HR



Kabag Media Cetak dan Media Sosial DPR RI Mohammad Djazuli dan Kasubag Media Cetak Sugeng Irianto saat rapat koordinasi Tim Website DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10). Foto: Oji/HR

